



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710  
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS: WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S- ~~606~~ /PK/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Permintaan Data Pengelola Laporan  
Dana Insentif Daerah (DID) 2020

26 Desember 2019

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah/BPKAD/BPPKAD/BKAD  
sebagaimana daftar terlampir

Dalam rangka penyampaian laporan persyaratan penyaluran DID Tahun 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Pasal 18 dan Pasal 19 PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, penyaluran DID diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran DID dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
    - 1) Tahap I sebesar 50% dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni; dan
    - 2) Tahap II sebesar 50% dari pagu alokasi paling cepat bulan Juli.
  - b. Penyaluran DID tahap I dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
    - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan;
    - 2) Rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan
    - 3) Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan DID pada tahun anggaran sebelumnya, dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Juni.
  - c. Penyaluran tahap II dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DID tahap I yang menunjukkan penyerapan paling sedikit 70% dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November.
  - d. Dalam hal persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada poin b dan c belum diterima sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, DID tidak disalurkan.
  - e. Persyaratan penyaluran DID disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.
2. Sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat 4 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 10/PK/2019 Tentang Penyusunan Dan Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Insentif Daerah (terlampir), Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat usulan administrator daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan persyaratan penyaluran DID melalui Portal TKDD dalam SIKD.

3. Berkenaan....

3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Saudara untuk mengirimkan informasi pegawai yang akan mengelola aplikasi pelaporan DID kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Umum sebagaimana terlampir di lampiran II. Selain itu, dalam hal Pemerintah Daerah ingin mengganti pegawai yang sudah ditugaskan sebagai administrator daerah, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan ulang surat usulan administrator daerah.
4. Pemerintah daerah dihimbau agar berhati-hati dan tidak menanggapi segala bentuk penawaran pihak-pihak yang mengaku/mengatasnamakan pegawai/pejabat Kementerian Keuangan atau siapapun yang dapat mengusahakan tambahan alokasi dana, mempercepat dan memaksimalkan pencairan dana TKDD serta tidak diperkenankan memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai DJPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK. Untuk informasi yang lebih valid terkait DID dapat diperoleh di *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) atau menghubungi *call center* kami di nomor 1500420.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Dana Transfer Umum



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Gubernur/Walikota/Bupati Pemerintah Daerah Penerima DID T.A. 2020 sebagaimana terlampir.

## LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan

Nomor : S-606/PK/2019

Tanggal : 26 Desember 2019

## Pemerintah Daerah Penerima DID 2020

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
1	Provinsi Aceh	Belum
2	Kab. Aceh Barat	Sudah
3	Kab. Aceh Besar	Belum
4	Kab. Aceh Selatan	Belum
5	Kab. Aceh Tengah	Belum
6	Kab. Aceh Tenggara	Belum
7	Kab. Aceh Timur	Belum
8	Kab. Aceh Utara	Belum
9	Kab. Bireuen	Sudah
10	Kab. Simeulue	Belum
11	Kota Banda Aceh	Sudah
12	Kota Sabang	Sudah
13	Kota Lhokseumawe	Sudah
14	Kab. Gayo Lues	Sudah
15	Kab. Aceh Barat Daya	Belum
16	Kab. Aceh Jaya	Sudah
17	Kab. Nagan Raya	Sudah
18	Kab. Aceh Tamiang	Belum
19	Kab. Pidie Jaya	Sudah
20	Kota Subulussalam	Belum
21	Kab. Asahan	Sudah
22	Kab. Dairi	Sudah
23	Kab. Deli Serdang	Belum
24	Kab. Tapanuli Selatan	Sudah
25	Kab. Tapanuli Utara	Belum
26	Kab. Toba Samosir	Sudah
27	Kota Binjai	Belum
28	Kota Sibolga	Belum
29	Kota Tebing Tinggi	Belum
30	Kab. Humbang Hasundutan	Sudah
31	Kab. Serdang Bedagai	Belum
32	Kab. Samosir	Sudah
33	Kab. Batu Bara	Belum
34	Kab. Padang Lawas Utara	Sudah

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
35	Kab. Labuhanbatu Selatan	Belum
36	Provinsi Sumatera Barat	Sudah
37	Kab. Limapuluh Kota	Sudah
38	Kab. Agam	Sudah
39	Kab. Kepulauan Mentawai	Sudah
40	Kab. Pasaman	Sudah
41	Kab. Pesisir Selatan	Sudah
42	Kab. Sijunjung	Sudah
43	Kab. Solok	Sudah
44	Kab. Tanah Datar	Sudah
45	Kota Bukit Tinggi	Sudah
46	Kota Padang Panjang	Sudah
47	Kota Padang	Sudah
48	Kota Payakumbuh	Sudah
49	Kota Solok	Sudah
50	Kota Pariaman	Sudah
51	Kab. Pasaman Barat	Sudah
52	Kab. Dharmasraya	Sudah
53	Kab. Solok Selatan	Sudah
54	Provinsi Riau	Belum
55	Kab. Bengkalis	Belum
56	Kab. Indragiri Hilir	Sudah
57	Kab. Indragiri Hulu	Belum
58	Kab. Kampar	Sudah
59	Kab. Kuantan Singingi	Belum
60	Kab. Pelalawan	Belum
61	Kab. Rokan Hilir	Belum
62	Kab. Rokan Hulu	Sudah
63	Kab. Siak	Sudah
64	Kota Dumai	Belum
65	Kota Pekanbaru	Sudah
66	Kab. Kepulauan Meranti	Sudah
67	Provinsi Jambi	Belum

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
68	Kab. Batang Hari	Sudah
69	Kab. Bungo	Belum
70	Kab. Kerinci	Belum
71	Kab. Muaro Jambi	Sudah
72	Kab. Sarolangun	Sudah
73	Kab. Tanjung Jabung Barat	Belum
74	Kab. Tanjung Jabung Timur	Sudah
75	Kab. Tebo	Belum
76	Kota Jambi	Sudah
77	Kota Sungai Penuh	Sudah
78	Provinsi Sumatera Selatan	Sudah
79	Kab. Lahat	Belum
80	Kab. Musi Banyuasin	Sudah
81	Kab. Musi Rawas	Belum
82	Kab. Muara Enim	Sudah
83	Kab. Ogan Komering Ilir	Sudah
84	Kab. Ogan Komering Ulu	Sudah
85	Kota Palembang	Sudah
86	Kota Prabumulih	Sudah
87	Kota Pagar Alam	Belum
88	Kota Lubuk Linggau	Sudah
89	Kab. Banyuasin	Sudah
90	Kab. Ogan Ilir	Sudah
91	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Sudah
92	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Sudah
93	Kab. Empat Lawang	Belum
94	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Belum
95	Kab. Musi Rawas Utara	Belum
96	Provinsi Bengkulu	Sudah
97	Kab. Bengkulu Utara	Belum
98	Kab. Rejang Lebong	Belum
99	Kota Bengkulu	Belum
100	Kab. Mukomuko	Sudah
101	Kab. Lebong	Belum
102	Kab. Kepahiang	Belum
103	Provinsi Lampung	Belum
104	Kab. Lampung Barat	Sudah

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
105	Kab. Lampung Selatan	Sudah
106	Kab. Lampung Tengah	Belum
107	Kab. Lampung Utara	Belum
108	Kab. Lampung Timur	Belum
109	Kab. Tanggamus	Sudah
110	Kab. Tulang Bawang	Sudah
111	Kab. Way Kanan	Sudah
112	Kota Bandar Lampung	Belum
113	Kota Metro	Sudah
114	Kab. Pesawaran	Belum
115	Kab. Pringsewu	Belum
116	Kab. Tulang Bawang Barat	Sudah
117	Provinsi DKI Jakarta	Sudah
118	Kab. Bandung	Sudah
119	Kab. Bekasi	Sudah
120	Kab. Bogor	Sudah
121	Kab. Ciamis	Sudah
122	Kab. Cirebon	Sudah
123	Kab. Garut	Sudah
124	Kab. Indramayu	Sudah
125	Kab. Karawang	Sudah
126	Kab. Kuningan	Sudah
127	Kab. Majalengka	Sudah
128	Kab. Purwakarta	Belum
129	Kab. Subang	Belum
130	Kab. Sukabumi	Sudah
131	Kab. Sumedang	Sudah
132	Kota Bandung	Sudah
133	Kota Bekasi	Sudah
134	Kota Bogor	Sudah
135	Kota Cirebon	Sudah
136	Kota Depok	Sudah
137	Kota Sukabumi	Sudah
138	Kota Tasikmalaya	Sudah
139	Kota Cimahi	Sudah
140	Kota Banjar	Sudah
141	Kab. Pangandaran	Sudah
142	Provinsi Jawa Tengah	Belum
143	Kab. Banjarnegara	Sudah
144	Kab. Banyumas	Sudah

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
145	Kab. Batang	Sudah
146	Kab. Blora	Sudah
147	Kab. Boyolali	Sudah
148	Kab. Cilacap	Sudah
149	Kab. Demak	Sudah
150	Kab. Grobogan	Sudah
151	Kab. Jepara	Sudah
152	Kab. Karanganyar	Sudah
153	Kab. Kebumen	Sudah
154	Kab. Kendal	Belum
155	Kab. Klaten	Belum
156	Kab. Kudus	Sudah
157	Kab. Magelang	Sudah
158	Kab. Pati	Belum
159	Kab. Pekalongan	Sudah
160	Kab. Pemasang	Sudah
161	Kab. Purbalingga	Sudah
162	Kab. Purworejo	Sudah
163	Kab. Rembang	Belum
164	Kab. Semarang	Sudah
165	Kab. Sragen	Sudah
166	Kab. Sukoharjo	Sudah
167	Kab. Tegal	Sudah
168	Kab. Temanggung	Sudah
169	Kab. Wonogiri	Sudah
170	Kab. Wonosobo	Sudah
171	Kota Magelang	Sudah
172	Kota Pekalongan	Sudah
173	Kota Salatiga	Sudah
174	Kota Semarang	Sudah
175	Kota Surakarta	Sudah
176	Kota Tegal	Belum
177	Provinsi DI Yogyakarta	Sudah
178	Kab. Bantul	Sudah
179	Kab. Gunung Kidul	Sudah
180	Kab. Kulon Progo	Belum
181	Kab. Sleman	Sudah
182	Kota Yogyakarta	Sudah
183	Provinsi Jawa Timur	Sudah
184	Kab. Bangkalan	Sudah
185	Kab. Banyuwangi	Sudah
186	Kab. Blitar	Belum
187	Kab. Bojonegoro	Sudah

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
188	Kab. Bondowoso	Sudah
189	Kab. Gresik	Belum
190	Kab. Jombang	Sudah
191	Kab. Kediri	Sudah
192	Kab. Lamongan	Sudah
193	Kab. Lumajang	Belum
194	Kab. Madiun	Sudah
195	Kab. Magetan	Sudah
196	Kab. Malang	Sudah
197	Kab. Mojokerto	Sudah
198	Kab. Nganjuk	Sudah
199	Kab. Ngawi	Sudah
200	Kab. Pacitan	Sudah
201	Kab. Pamekasan	Sudah
202	Kab. Pasuruan	Belum
203	Kab. Ponorogo	Sudah
204	Kab. Probolinggo	Sudah
205	Kab. Sampang	Sudah
206	Kab. Sidoarjo	Sudah
207	Kab. Situbondo	Sudah
208	Kab. Sumenep	Sudah
209	Kab. Trenggalek	Sudah
210	Kab. Tuban	Sudah
211	Kota Blitar	Sudah
212	Kota Kediri	Sudah
213	Kota Madiun	Sudah
214	Kota Malang	Sudah
215	Kota Mojokerto	Belum
216	Kota Probolinggo	Sudah
217	Kota Surabaya	Sudah
218	Kota Batu	Sudah
219	Kab. Landak	Belum
220	Kab. Kapuas Hulu	Belum
221	Kab. Ketapang	Sudah
222	Kab. Mempawah	Sudah
223	Kab. Sambas	Belum
224	Kab. Sanggau	Belum
225	Kab. Sintang	Belum
226	Kota Pontianak	Sudah
227	Kota Singkawang	Belum
228	Kab. Sekadau	Belum
229	Kab. Kubu Raya	Sudah
230	Provinsi Kalimantan Tengah	Sudah

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
231	Kab. Barito Selatan	Belum
232	Kab. Barito Utara	Sudah
233	Kab. Kapuas	Sudah
234	Kab. Kotawaringin Barat	Sudah
235	Kab. Kotawaringin Timur	Sudah
236	Kota Palangkaraya	Sudah
237	Kab. Katingan	Belum
238	Kab. Sukamara	Sudah
239	Kab. Lamandau	Sudah
240	Kab. Gunung Mas	Sudah
241	Kab. Pulang Pisau	Sudah
242	Kab. Murung Raya	Belum
243	Kab. Barito Timur	Sudah
244	Provinsi Kalimantan Selatan	Sudah
245	Kab. Banjar	Sudah
246	Kab. Barito Kuala	Sudah
247	Kab. Hulu Sungai Selatan	Belum
248	Kab. Hulu Sungai Tengah	Belum
249	Kab. Hulu Sungai Utara	Sudah
250	Kab. Kotabaru	Sudah
251	Kab. Tabalong	Sudah
252	Kab. Tanah Laut	Belum
253	Kab. Tapin	Sudah
254	Kota Banjarbaru	Sudah
255	Kota Banjarmasin	Sudah
256	Kab. Balangan	Belum
257	Kab. Tanah Bumbu	Sudah
258	Provinsi Kalimantan Timur	Sudah
259	Kab. Berau	Sudah
260	Kab. Kutai Kartanegara	Belum
261	Kab. Kutai Barat	Sudah
262	Kab. Kutai Timur	Sudah
263	Kab. Paser	Belum
264	Kota Balikpapan	Sudah
265	Kota Bontang	Sudah
266	Kota Samarinda	Sudah
267	Kab. Penajam Paser Utara	Sudah

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
268	Provinsi Sulawesi Utara	Belum
269	Kab. Minahasa	Sudah
270	Kab. Kepulauan Sangihe	Sudah
271	Kota Bitung	Belum
272	Kota Manado	Sudah
273	Kab. Kepulauan Talaud	Belum
274	Kab. Minahasa Selatan	Sudah
275	Kota Tomohon	Sudah
276	Kab. Minahasa Utara	Belum
277	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Belum
278	Kota Kotamobagu	Belum
279	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Belum
280	Kab. Minahasa Tenggara	Belum
281	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Belum
282	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Belum
283	Provinsi Sulawesi Tengah	Belum
284	Kab. Buol	Sudah
285	Kab. Morowali	Belum
286	Kab. Poso	Belum
287	Kota Palu	Sudah
288	Kab. Parigi Moutong	Belum
289	Kab. Tojo Una Una	Sudah
290	Kab. Sigi	Sudah
291	Kab. Banggai Laut	Belum
292	Provinsi Sulawesi Selatan	Sudah
293	Kab. Bantaeng	Sudah
294	Kab. Barru	Sudah
295	Kab. Bone	Sudah
296	Kab. Bulukumba	Sudah
297	Kab. Enrekang	Belum
298	Kab. Gowa	Sudah
299	Kab. Luwu	Belum
300	Kab. Luwu Utara	Belum
301	Kab. Maros	Sudah
302	Kota Palopo	Sudah
303	Kab. Pinrang	Belum

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
304	Kab. Kepulauan Selayar	Belum
305	Kab. Sidenreng Rappang	Belum
306	Kab. Soppeng	Sudah
307	Kab. Wajo	Sudah
308	Kota Makassar	Belum
309	Kab. Toraja Utara	Sudah
310	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sudah
311	Kab. Buton	Belum
312	Kab. Konawe	Sudah
313	Kab. Kolaka	Sudah
314	Kota Kendari	Sudah
315	Kota Bau-bau	Sudah
316	Kab. Konawe Selatan	Belum
317	Kab. Bombana	Belum
318	Kab. Kolaka Utara	Sudah
319	Kab. Konawe Utara	Belum
320	Kab. Buton Utara	Belum
321	Kab. Kolaka Timur	Belum
322	Kab. Muna Barat	Sudah
323	Kab. Buton Tengah	Sudah
324	Kab. Buton Selatan	Belum
325	Provinsi Bali	Sudah
326	Kab. Badung	Sudah
327	Kab. Bangli	Sudah
328	Kab. Buleleng	Sudah
329	Kab. Gianyar	Sudah
330	Kab. Jembrana	Sudah
331	Kab. Karangasem	Sudah
332	Kab. Klungkung	Sudah
333	Kab. Tabanan	Sudah
334	Kota Denpasar	Sudah
335	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sudah
336	Kab. Bima	Belum
337	Kab. Dompu	Sudah
338	Kab. Lombok Barat	Sudah
339	Kab. Lombok Tengah	Sudah
340	Kab. Lombok Timur	Sudah
341	Kab. Sumbawa	Sudah
342	Kota Mataram	Sudah
343	Kota Bima	Sudah

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
344	Kab. Sumbawa Barat	Sudah
345	Kab. Lombok Utara	Sudah
346	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Belum
347	Kab. Belu	Belum
348	Kab. Manggarai	Belum
349	Kab. Ngada	Belum
350	Kab. Sumba Timur	Belum
351	Kab. Manggarai Barat	Belum
352	Kab. Manggarai Timur	Belum
353	Kab. Kepulauan Tanimbar	Belum
354	Kab. Maluku Tengah	Sudah
355	Kab. Maluku Tenggara	Sudah
356	Kab. Buru	Sudah
357	Kota Ambon	Sudah
358	Kota Tual	Belum
359	Kab. Jayapura	Belum
360	Kab. Mimika	Belum
361	Kab. Nabire	Sudah
362	Kota Jayapura	Sudah
363	Kab. Yalimo	Belum
364	Kab. Halmahera Tengah	Belum
365	Kota Ternate	Sudah
366	Kab. Halmahera Barat	Sudah
367	Kab. Halmahera Timur	Belum
368	Kab. Halmahera Utara	Belum
369	Kota Tidore Kepulauan	Belum
370	Kab. Pulau Morotai	Belum
371	Provinsi Banten	Belum
372	Kab. Lebak	Sudah
373	Kab. Pandeglang	Belum
374	Kab. Serang	Sudah
375	Kab. Tangerang	Sudah
376	Kota Cilegon	Sudah
377	Kota Tangerang	Sudah
378	Kota Serang	Belum
379	Kota Tangerang Selatan	Sudah

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
380	Provinsi Bangka Belitung	Belum
381	Kab. Bangka	Sudah
382	Kota Pangkal Pinang	Sudah
383	Kab. Bangka Tengah	Sudah
384	Provinsi Gorontalo	Sudah
385	Kab. Boalemo	Belum
386	Kab. Gorontalo	Sudah
387	Kota Gorontalo	Sudah
388	Kab. Pohuwato	Sudah
389	Kab. Bone Bolango	Sudah
390	Kab. Gorontalo Utara	Sudah
391	Provinsi Kepulauan Riau	Sudah
392	Kab. Natuna	Sudah
393	Kab. Kepulauan Anambas	Belum
394	Kab. Karimun	Sudah
395	Kota Batam	Sudah
396	Kota Tanjung Pinang	Sudah
397	Kab. Lingga	Sudah
398	Kab. Bintan	Belum

No.	Nama Daerah	Penyampaian Surat Usulan Admin Daerah
399	Provinsi Papua Barat	Belum
400	Kab. Fak Fak	Belum
401	Kab. Sorong	Belum
402	Kab. Raja Ampat	Sudah
403	Kab. Sorong Selatan	Sudah
404	Kab. Teluk Bintuni	Belum
405	Kab. Teluk Wondama	Belum
406	Kab. Kaimana	Belum
407	Provinsi Sulawesi Barat	Sudah
408	Kab. Majene	Sudah
409	Kab. Polewali Mandar	Belum
410	Kab. Mamasa	Sudah
411	Kab. Pasangkayu	Sudah
412	Kab. Mamuju Tengah	Sudah
413	Provinsi Kalimantan Utara	Belum
414	Kab. Malinau	Belum
415	Kab. Nunukan	Belum
416	Kab. Tana Tidung	Belum

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Dana Transfer Umum





Format Data Pegawai Pengelola Aplikasi Pelaporan DID

## (KOP SURAT)

---

Kami pejabat yang bertanda tangan dibawah ini .....<sup>(1)</sup>, menyatakan bahwa saya menugaskan pegawai sebagaimana berikut untuk mengelola aplikasi penyampaian laporan Dana Insentif Daerah.

Adapun data pegawai tersebut adalah:

1. Nama : .....<sup>(2)</sup>
2. Instansi : .....<sup>(3)</sup>
3. Jabatan : .....<sup>(4)</sup>
4. No. Hp (WA) : .....<sup>(5)</sup>
5. No. Telepon Kantor : .....<sup>(6)</sup>

Dengan alamat email yang akan didaftarkan sebagai akun pengelola yakni .....<sup>(7)</sup>. Demikian data pegawai pengelola aplikasi pelaporan DID Prov/Kab/Kota .....<sup>(8)</sup>.

.....<sup>(9)</sup>  
Kepala Badan .....<sup>(10)</sup>

ttd. dan stempel

.....<sup>(11)</sup>  
.....<sup>(12)</sup>

